

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM
SUB UNIT KERJA : BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIK LUJAYANTI
2. Jabatan : KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 718697

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.101.486.000

1. Tanah Seluas 340 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 612.500.000
2. Tanah Seluas 252 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 730.766.000
3. Tanah Seluas 1094 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 171.938.000
4. Tanah Seluas 295 m2 di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.079.140.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 286.300.000
6. Tanah Seluas 610 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.444.000
7. Tanah Seluas 135 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 109.530.000
8. Tanah Seluas 2.663 m2 di KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 95.868.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	969.935.704
F. HARTA LAINNYA	Rp.	250.000.000
Sub Total	Rp.	4.421.421.704
III. HUTANG	Rp.	118.380.345
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.303.041.359

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.